

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PERSIAPAN PROSES AKSESI INDONESIA
PADA *THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT* UNTUK AREA KEBIJAKAN PENGADAAN PUBLIK DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2023 agar Indonesia segera menjadi anggota *The Organization for Economic Co-Operation and Development*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor KWU/192/M.EKON/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Intensi Pemerintah Indonesia untuk Menjadi Anggota *The Organization for Economic Co-Operation and Development*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu membentuk Tim Persiapan Proses Akses Indonesia Pada *The Organization For Economic Co-Operation And Development* pada area kebijakan pengadaan publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Persiapan Proses Akses Indonesia pada *The Organization For Economic Co-Operation And Development* untuk Area Kebijakan Pengadaan Publik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERSIAPAN PROSES AKSESI INDONESIA PADA *THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT* UNTUK AREA KEBIJAKAN PENGADAAN PUBLIK DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Persiapan Proses Aksesasi Indonesia pada *The Organization For Economic Co-Operation And Development* (OECD) untuk Area Kebijakan Pengadaan Publik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk yang selanjutnya disebut Tim Persiapan Aksesasi OECD dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan Aksesasi OECD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Kebijakan, dan Tim Kerja yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Tim Persiapan Aksesasi OECD bertanggung jawab terhadap persiapan aksesasi Indonesia pada OECD untuk elemen pengadaan publik dan menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Tim Kebijakan bertugas:
 - a. memastikan teknis persiapan aksesasi Indonesia pada OECD untuk elemen pengadaan publik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan sasaran;
 - b. mengidentifikasi instrumen hukum serta praktik dan kebijakan OECD mengenai pengadaan publik dan kaitannya dengan proses aksesasi Indonesia untuk elemen pengadaan publik;
 - c. mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi menjadi isu lintas sektoral dalam proses aksesasi Indonesia pada OECD terkait dengan pengadaan publik;

- d. menganalisis kesenjangan sistem pengadaan publik di Indonesia dengan instrumen hukum serta praktik dan kebijakan OECD mengenai pengadaan publik;
 - e. melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga terkait, OECD Indonesia, Sekretariat OECD, Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri, dan pemangku kepentingan yang relevan; dan
 - f. menyampaikan proses dan hasil persiapan akses Indonesia pada OECD untuk elemen pengadaan publik pada Penanggung Jawab Tim Persiapan Akses OECD.
3. Tim Kerja bertugas:
- a. melakukan identifikasi, analisis, dan penyiapan terkait program, rencana kerja, keorganisasian, serta penganggaran pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka akses Indonesia pada OECD;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai persiapan akses Indonesia pada OECD untuk elemen pengadaan publik;
 - c. memonitor teknis persiapan akses Indonesia pada OECD untuk elemen pengadaan publik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - d. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c kepada Penanggung Jawab Tim Persiapan Akses OECD.

KETIGA : Tim Persiapan Akses OECD bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PERSIAPAN PROSES AKSESI
INDONESIA PADA *THE ORGANIZATION FOR
ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT* UNTUK ELEMEN
PENGADAAN PUBLIK DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

**TIM PERSIAPAN PROSES AKSESI INDONESIA
PADA *THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT* UNTUK ELEMEN PENGADAAN PUBLIK DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan>Nama
1	Penanggung Jawab	: Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional
2	Tim Kebijakan	: 1. Antonius Lambok Sihombing 2. Yuyu Yulianti 3. Mustika Rosalina Putri 4. Januar Indra 5. Rasmita Juliana Sitepu 6. Octo Army 7. Widya Prima Sari Fultanegara 8. Febrita Sidabalok 9. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 10. Linda Mikowati 11. Yohana Surat Payon Philips 12. Adreng Kusuma Ayuningtyas

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan>Nama
		13. Satriyo Wibowo 14. Syukri 15. Ferisa Rahmani 16. Putri Triyandini 17. Tri Astutik 18. Muhammad Faishal Saifullah Fatah 19. Maghfira Salsabila Muthmainnah
3	Tim Kerja	: 1. Setio Widodo 2. Edi Kristiyanto 3. Rinaldi Morintosh 4. Ermawanto 5. Agita Marelia Ulfa 6. Nicke Kusuma Devi 7. Asih Riska Nurmasari 8. Ahmad Wiza Walady

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SARAH SADIQA